

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara yang maju tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh stabilitas struktur demografi penduduk. Struktur demografi yang stabil diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk usia produktif dan usia nonproduktif, sehingga mampu mendukung keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang (OCED, 2024). Keseimbangan komposisi penduduk menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan, karena ketidak seimbangan struktur usia dapat menimbulkan tekanan terhadap sistem ekonomi, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu faktor yang berperan dalam menjaga keseimbangan demografi adalah keberlangsungan pembentukan keluarga melalui pernikahan. Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam pembentukan keluarga, proses reproduksi penduduk, serta pembentukan kualitas sumber daya manusia dalam Masyarakat (Becker, 1991; E & Hiappori, 2015). Dalam kajian demografi modern, penurunan angka pernikahan dapat berdampak langsung terhadap tingkat fertilitas dan dinamika kependudukan, sehingga memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara (Smith, 2019). Selain itu, keputusan untuk menikah juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, seperti biaya hidup, pendidikan, serta perubahan struktur pasar kerja yang dapat menurunkan kecenderungan individu untuk membentuk keluarga (Gao et al., 2022). Dengan demikian kestabilan angka pernikahan dapat digunakan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan kondisi sosial dan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Perubahan pada angka pernikahan seringkali berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi, demografi, dan sosial yang terjadi dalam masyarakat, sehingga fenomena penurunan angka pernikahan perlu dikaji sebagai bagian dari dinamika pembangunan kependudukan.

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara di dunia mengalami kecenderungan penurunan angka pernikahan yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial ekonomi, dan demografi masyarakat modern, Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan individu untuk menikah tidak lagi semata-mata ditentukan oleh norma sosial dan budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, stabilitas pekerjaan, serta peluang dalam pasar tenaga kerja (Punyasavatsut, 2020). Perubahan struktur pasar kerja, meningkatnya tingkat pengangguran, serta ketidakpastian ekonomi terbukti memiliki pengaruh terhadap keputusan individu dalam membentuk rumah tangga, terutama pada kelompok usia produktif yang menghadapi tekanan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan membangun keluarga (Raymo et al., 2021).

Di negara berkembang, pengaruh faktor ekonomi terhadap keputusan menikah cenderung lebih kuat karena tingkat kesejahteraan yang belum merata dan masih tingginya ketimpangan pembangunan manusia (UNFPA, 2023). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih menunda pernikahan sampai memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil. Transformasi sosial ekonomi yang berlangsung cepat juga mengubah pola transisi menuju pernikahan, di mana keputusan untuk menikah semakin dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, stabilitas pekerjaan, dan kondisi kesejahteraan rumah tangga (Utomo et al., 2022)

Fenomena penurunan angka pernikahan juga mulai terlihat di Indonesia, Perubahan struktur ekonomi, meningkatnya tingkat pendidikan, serta dinamika

pasar tenaga kerja menyebabkan pergeseran perilaku masyarakat dalam membentuk keluarga. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah penduduk usia muda yang belum menikah, yang mengindikasikan adanya perubahan pola dan preferensi masyarakat terhadap pernikahan (Hasanah, 2025). Perubahan tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor sosial dan ekonomi, seperti tingkat pengangguran, kesempatan kerja, tingkat kesejahteraan, serta kualitas pembangunan manusia yang berbeda antar wilayah, sehingga memengaruhi kesiapan individu dalam membentuk rumah tangga (BPS 2024).

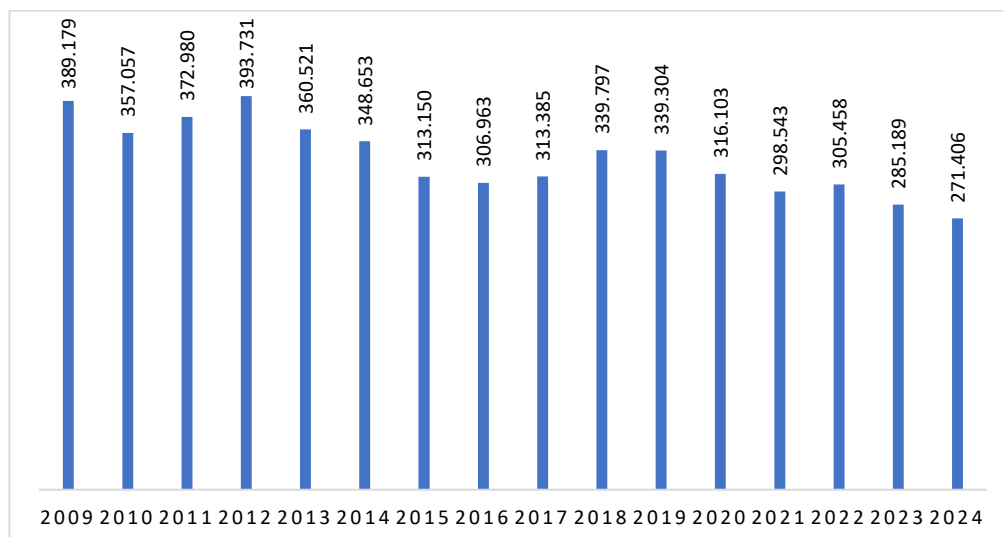
Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur juga mengalami kecenderungan penurunan angka pernikahan selama periode 2009-2024. Penurunan tersebut terjadi bersamaan dengan fluktuasi tingkat pengangguran terbuka yang mencerminkan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, terutama di kalangan usia muda yang berada pada fase produktif dan potensial untuk membentuk rumah tangga. Ketidakstabilan pasar kerja serta meningkatnya tingkat pengangguran dapat memengaruhi keputusan individu untuk menikah, karena keterbatasan pendapatan dan tingginya ketidakpastian ekonomi seringkali menjadi pertimbangan utama dalam kesiapan membangun keluarga (Punyasavatsut, 2020). Selain faktor ketenagakerjaan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berpotensi memengaruhi perubahan perilaku masyarakat dalam keputusan menikah. Peningkatan tingkat pendidikan, harapan hidup, serta kesempatan kerja yang lebih luas cenderung mendorong individu untuk menunda usia pernikahan, karena adanya pergeseran prioritas ke arah pengembangan karier, peningkatan kualitas hidup, dan kesiapan

ekonomi yang lebih matang (UNDP, 2023). Tingkat kemiskinan yang masih menjadi persoalan struktural di beberapa kabupaten atau kota di Jawa Timur juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembentukan keluarga. Keterbatasan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat menunda atau bahkan menghindari pernikahan karena belum memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat (BPS 2024).

Perubahan pola pernikahan dalam beberapa sepuluh tahun terakhir tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga memengaruhi struktur demografi penduduk. Perubahan seperti meningkatnya usia menikah serta bertambahnya jumlah individu yang tidak menikah dapat berkontribusi terhadap proses penuaan penduduk dan perubahan komposisi umur masyarakat (Fernández, 2025). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai tantangan bagi perekonomian, terutama terkait dengan berkurangnya proporsi penduduk usia produktif dan meningkatnya beban sistem perlindungan sosial akibat bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia. Penurunan angka pernikahan juga berkaitan erat dengan menurunnya tingkat fertilitas, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ketersediaan tenaga kerja serta keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial (UNFPA, 2023). Pada konteks Indonesia, data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya perubahan perilaku demografi masyarakat, termasuk kecenderungan meningkatnya usia menikah dan menurunnya pembentukan keluarga baru dalam beberapa tahun terakhir (BPS, 2024). Perubahan tersebut tidak terlepas dari dinamika ekonomi yang

memengaruhi kesiapan individu dalam membangun rumah tangga. Ketidakpastian ekonomi, meningkatnya tingkat pengangguran, serta keterbatasan pendapatan seringkali menyebabkan individu menunda pernikahan sampai kondisi ekonomi dianggap lebih stabil (Raymo et al., 2022). Di tingkat regional, Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Penurunan angka pernikahan berimplikasi pada perubahan pola kehidupan sosial masyarakat, termasuk meningkatnya usia menikah, berkurangnya pembentukan keluarga baru, serta perubahan preferensi generasi muda terhadap pernikahan. Kondisi ini berkaitan dengan faktor ekonomi dan pembangunan manusia, di mana stabilitas pekerjaan, tingkat kesejahteraan, serta kualitas sumber daya manusia menjadi pertimbangan penting dalam keputusan untuk menikah (Gao et al., 2022). Oleh karena itu, penurunan angka pernikahan tidak hanya merupakan fenomena demografis, tetapi juga mencerminkan permasalahan struktural yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, dan pembangunan manusia. Upaya untuk mengatasi kecenderungan tersebut memerlukan kebijakan yang terintegrasi, terutama dalam meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat usia produktif, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia agar individu memiliki kesiapan sosial dan finansial dalam membentuk keluarga (World Bank, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, angka pernikahan selama periode 2009-2024 menunjukkan kecenderungan menurun yang diduga berkaitan dengan dinamika kondisi ekonomi, tingkat pengangguran, serta perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Gambaran mengenai perkembangan angka pernikahan di Provinsi Jawa Timur selama periode tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1. 1 Angka Pernikahan Di Provinsi Jawa Timur (Kejadian)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024.

Gambar grafik 1.1 memperlihatkan perkembangan jumlah pernikahan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2024. Secara umum, angka pernikahan menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam jangka panjang. Pada awal periode, jumlah pernikahan berada pada tingkat relatif tinggi, yaitu pada tahun 2009 sebesar 389.179 kejadian dan mencapai salah satu titik tertinggi pada tahun 2012 sebesar 393.731 kejadian, sehingga periode ini dapat dikategorikan sebagai fase stabil dengan tingkat pernikahan yang masih tinggi.

Perubahan tren mulai terlihat setelah tahun 2013, ketika jumlah pernikahan turun menjadi 360.521 kejadian dan terus menurun hingga mencapai 313.150 kejadian pada tahun 2015, yang menandai awal fase kontraksi jumlah pernikahan. Setelah itu terjadi peningkatan pada tahun 2018 menjadi 339.797 kejadian, namun kenaikan tersebut tidak berlangsung lama.

Memasuki periode terbaru, penurunan kembali terjadi secara lebih konsisten, terutama sejak tahun 2020 dengan jumlah 316.103 kejadian, kemudian menurun menjadi 298.543 pada tahun 2021, dan terus mengalami penurunan

hingga mencapai titik terendah pada tahun 2024 sebesar 271.406 kejadian. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir tren penurunan angka pernikahan semakin menguat.

Secara struktural, periode 2009-2012 dapat dikategorikan sebagai fase stabil dengan angka pernikahan tinggi, sedangkan periode setelah 2013 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang semakin jelas pada periode 2020-2024. Penurunan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir diduga berkaitan dengan berbagai faktor sosial dan ekonomi, seperti tingkat pengangguran, pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan, yang memengaruhi kesiapan masyarakat dalam membentuk rumah tangga.

Fenomena penurunan angka pernikahan menunjukkan adanya faktor-faktor determinan yang bersifat ekonomi dan sosial yang memengaruhi keputusan individu dalam membentuk rumah tangga. Berkurangnya pembentukan rumah tangga baru dapat memengaruhi dinamika permintaan agregat, terutama pada sektor perumahan, konsumsi rumah tangga, serta jasa yang berkaitan dengan pernikahan (Becker, 1991; World Bank, 2022). Dalam jangka panjang, penurunan angka pernikahan juga berpotensi memengaruhi struktur angkatan kerja dan kapasitas pertumbuhan ekonomi, karena berkurangnya pembentukan keluarga baru dapat memperlambat pertumbuhan penduduk usia produktif dan meningkatkan beban demografi di masa mendatang (Raymo et al., 2022)

Penurunan tingkat pernikahan tidak hanya berdampak pada perubahan struktur dan dinamika keluarga, tetapi juga menimbulkan implikasi ekonomi yang signifikan. Dalam perspektif ekonomi keluarga, institusi pernikahan berperan sebagai mekanisme penting dalam distribusi dan transfer sumber daya antaranggota keluarga serta antar generasi, sekaligus menjadi sarana

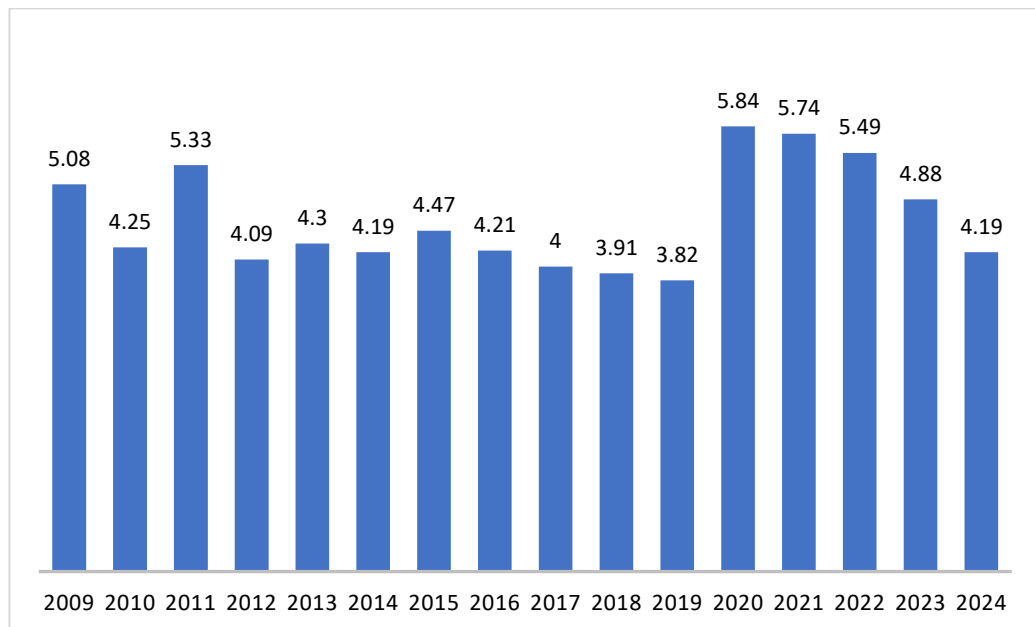
pembentukan modal sosial yang mendukung stabilitas dan produktivitas ekonomi dalam masyarakat (Becker, 1991; Pollak, 2015). Maka dari itu, kestabilan angka pernikahan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, karena terbentuknya rumah tangga baru umumnya diikuti dengan peningkatan aktivitas konsumsi, tabungan, dan investasi yang mendorong permintaan agregat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penurunan angka pernikahan di Provinsi Jawa Timur. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut penting dilakukan agar perubahan angka pernikahan dapat dipahami secara komprehensif, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas demografi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kajian ekonomi keluarga modern, keputusan untuk menikah semakin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan stabilitas pekerjaan. Pernikahan tidak lagi hanya dipandang sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai institusi yang mensyaratkan kesiapan finansial dan kepastian pendapatan. Individu yang menghadapi ketidakpastian kerja, tingkat pengangguran yang tinggi, serta pendapatan yang tidak stabil cenderung menunda bahkan menghindari pernikahan karena merasa belum memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membentuk rumah tangga (Gao et al., 2022; Raymo et al., 2021). Meskipun tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan yang tersedia. Sebagian besar tenaga kerja masih bekerja pada sektor informal atau pekerjaan kontrak yang ditandai dengan pendapatan yang tidak stabil, upah relatif rendah, serta minimnya perlindungan dan jaminan sosial (Sibagariang et al., 2022). Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja menghadapi ketidakpastian ekonomi dan

keterbatasan dalam merencanakan masa depan secara finansial. Akibatnya, meskipun telah bekerja, sebagian individu masih merasa belum memiliki kesiapan ekonomi yang memadai untuk membentuk rumah tangga dan melangsungkan pernikahan (Adinda & Akbar, 2024). Dengan demikian meskipun seseorang telah bekerja, tidak sedikit yang masih merasa belum memiliki kesiapan ekonomi yang cukup untuk memasuki jenjang pernikahan. Hal ini mengindikasikan bahwa status bekerja saja belum tentu mampu mendorong seseorang untuk menikah apabila pekerjaan tersebut belum memberikan pendapatan yang layak dan kepastian ekonomi. (OCED, 2024) menjelaskan bahwa pasar kerja yang kuat, ketersediaan pekerjaan yang stabil, serta tingkat upah yang memadai merupakan faktor yang dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk menikah karena memberikan rasa aman secara finansial dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, kualitas pekerjaan menjadi aspek yang lebih penting dibandingkan sekadar penurunan tingkat pengangguran dalam memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah.

Oleh karena itu untuk melihat dinamika kondisi ketenagakerjaan di provinsi Jawa Timur, berikut disajikan Gambar 1.2 yang menunjukkan perkembangan Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2024.

Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur (Persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Dapat dilihat dinamika grafik 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di provinsi Jawa Timur pada tahun 2009-2024. Pada tahun 2009 Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 5,08 persen, yang kemudian menurun pada tahun 2010 menjadi 4,25 persen. Namun demikian, pada tahun 2011 terjadi peningkatan menjadi 5,33 persen, kembali mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 4,09 persen. Pada tahun 2013 dan 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka relatif stabil masing-masing sebesar 4,30 persen dan 4,19 persen, dan pada tahun 2019 menjadi 3,82 persen. Tren ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi pasar tenaga kerja yang tercermin dari meningkatnya kapasitas penyerapan tenaga kerja serta stabilitas aktivitas ekonomi daerah pada periode tersebut. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi lonjakan signifikan Tingkat Pengangguran Terbuka hingga mencapai 5,84 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Peningkatan ini secara struktural dapat dikaitkan dengan

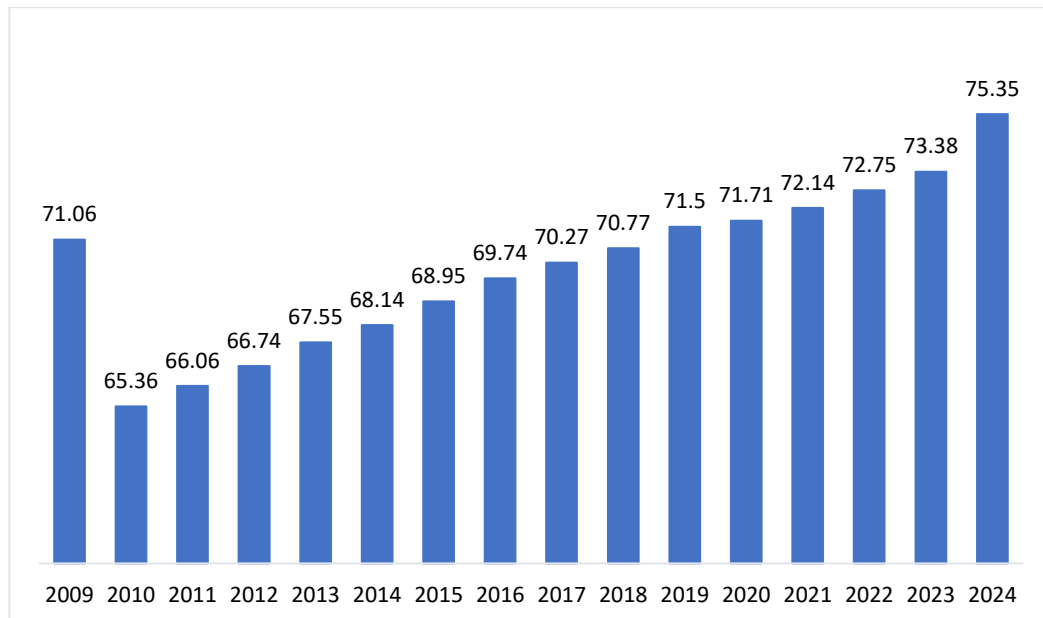
dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi, disrupti rantai produksi, serta meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Pada periode selanjutnya, yakni tahun 2021 dan 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka mulai mengalami penurunan secara bertahap menjadi 5,74 persen dan 5,49 persen, yang mencerminkan proses pemulihan ekonomi dan penyesuaian pasar tenaga kerja pasca krisis. Tren penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023 sebesar 4,88 persen dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 4,19 persen, sehingga mendekati tingkat prapandemi pemulihan aktivitas industri dan perdagangan, serta intervensi kebijakan pemerintah melalui stimulus fiskal dan program penciptaan lapangan kerja turut berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Variabel lain yang diduga memengaruhi perubahan angka pernikahan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendidikan sebagai salah satu komponen utama dalam IPM memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku sosial, termasuk dalam keputusan untuk menikah. Peningkatan tingkat pendidikan cenderung mendorong individu untuk menunda usia pernikahan karena adanya prioritas terhadap pengembangan karier, peningkatan kualitas hidup, serta kesiapan ekonomi yang lebih matang (Gao et al., 2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (Putri & Budiman, 2025). Pendidikan memainkan peran utama dalam meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Astuti, 2021) Daerah dengan nilai IPM yang lebih tinggi

umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dan partisipasi kerja yang lebih tinggi, sehingga kecenderungan masyarakat untuk menunda pernikahan menjadi lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat pembangunan manusia lebih rendah (World Bank, 2022).

Dengan demikian, peningkatan IPM tidak selalu diikuti dengan meningkatnya angka pernikahan, tetapi dalam banyak kasus justru berkorelasi dengan penurunan atau penundaan pernikahan karena individu lebih memprioritaskan pendidikan, pekerjaan, dan stabilitas ekonomi sebelum membentuk rumah tangga. Maka dari itu, IPM menjadi salah satu variabel penting yang perlu dianalisis dalam melihat perubahan angka pernikahan. Untuk menggambarkan perkembangan kondisi pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur, berikut disajikan Gambar 1.3 yang menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama periode 2009-2024.

Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur
(Persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Berdasarkan Gambar 1.3, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2024 menunjukkan tren meningkat, meskipun terdapat perlambatan pada beberapa periode tertentu. Pada tahun 2009 nilai IPM tercatat sebesar 71,06, kemudian pada tahun 2010 menjadi 65,36. Perbedaan angka tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan penurunan kualitas pembangunan manusia, melainkan disebabkan oleh perubahan metodologi penghitungan IPM yang mulai diterapkan secara nasional.

Sejak tahun 2011, IPM kembali menunjukkan tren peningkatan, yaitu menjadi 66,06 dan terus meningkat hingga mencapai 68,14 pada tahun 2014. Kenaikan ini menandai adanya perbaikan dalam kualitas pembangunan manusia yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Tren peningkatan berlanjut hingga mencapai 71,71 pada tahun 2020, namun laju

pertumbuhannya relatif melambat dibandingkan periode sebelumnya. Perlambatan tersebut dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk terganggunya aktivitas pendidikan, tekanan pada sektor kesehatan, serta menurunnya daya beli masyarakat.

Setelah periode pandemi, IPM kembali menunjukkan peningkatan yang lebih stabil hingga mencapai 75,35 pada tahun 2024, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Secara umum, periode 2011-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kemiskinan juga merupakan salah satu variabel yang diduga berpengaruh terhadap perubahan angka pernikahan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memengaruhi kesiapan individu dalam membentuk rumah tangga, karena pernikahan membutuhkan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi dan ketidakpastian pendapatan dapat menyebabkan individu menunda pernikahan hingga memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil (Raymo et al., 2018). Selain itu, tekanan ekonomi pada rumah tangga berpendapatan rendah juga berkaitan dengan perubahan pola pembentukan keluarga dan meningkatnya usia menikah (Gao et al., 2022).

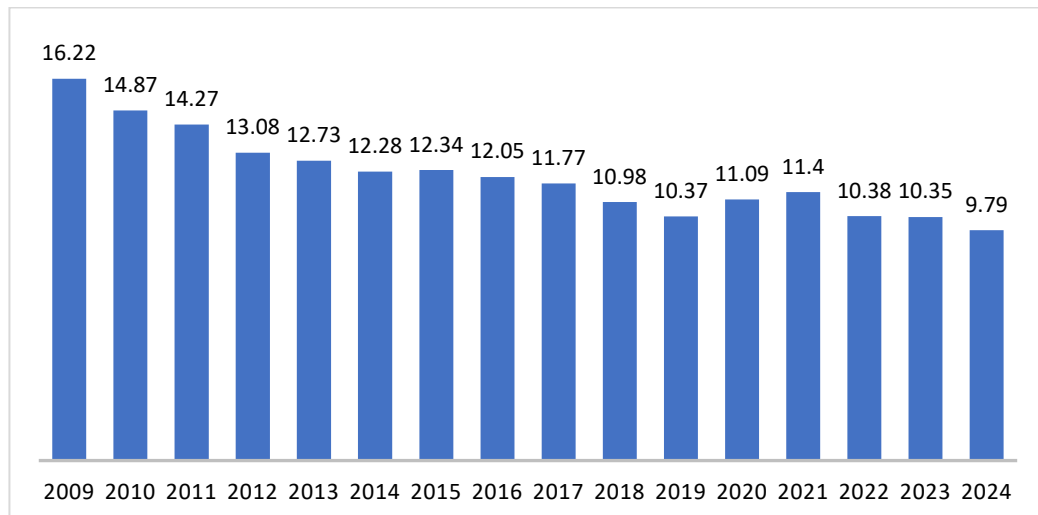
Secara konseptual, kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik kebutuhan fisik maupun sosial. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan

rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, sehingga dipahami sebagai fenomena yang bersifat multidimensional (Alkire & Foster, 2016). Tingkat kemiskinan yang tinggi mencerminkan rendahnya kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan ekonomi individu dalam mengambil keputusan untuk menikah.

Penurunan kemiskinan secara berkelanjutan berkaitan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial, akan tetapi meskipun tingkat kemiskinan mengalami penurunan, kondisi tersebut tidak serta-merta diikuti oleh menurunnya beban ekonomi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, biaya hidup justru terus meningkat, seperti harga rumah atau biaya sewa tempat tinggal, kebutuhan anak, biaya resepsi pernikahan, serta pengeluaran kebutuhan sehari-hari sehingga persepsi masyarakat terhadap kesiapan ekonomi tetap rendah (Gao et al., 2022). Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat yang telah keluar dari kategori miskin masih merasa belum memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membangun rumah tangga. Selain itu, meningkatnya harga perumahan terbukti dapat menunda keputusan menikah karena individu membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga (LIU Jinshan, 2024). Dengan demikian, rendahnya tingkat kemiskinan tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya angka pernikahan, karena keputusan menikah juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap keamanan ekonomi, biaya hidup, dan kesiapan finansial jangka Panjang.

Untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, berikut Gambar 1.4 yang menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2024.

Gambar 1. 4 Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur (Persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Gambar grafik 1.4, menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2024 secara umum menunjukkan tren menurun, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada awal periode, tingkat kemiskinan masih berada pada level relatif tinggi, yaitu sebesar 16,22 persen pada tahun 2009. Penurunan terjadi secara bertahap hingga mencapai 12,73 persen pada tahun 2013, yang mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Setelah itu, penurunan berlanjut hingga mencapai 10,37 persen pada tahun 2019, yang merupakan salah satu titik terendah sebelum terjadi gangguan ekonomi. Namun, pada periode pandemi COVID-19, tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 11,09 persen pada tahun 2020 dan 11,40 persen pada tahun

2021. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang berdampak pada pendapatan rumah tangga dan kesempatan kerja masyarakat.

Pada periode setelah pandemi, tingkat kemiskinan kembali menunjukkan tren penurunan hingga mencapai 9,79 persen pada tahun 2024, yang merupakan nilai terendah selama periode pengamatan. Secara struktural, periode 2009-2019 menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten, sementara periode 2020-2021 menunjukkan peningkatan akibat guncangan ekonomi, dan periode 2022-2024 menunjukkan fase pemulihan yang ditandai dengan kembali menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil telaah pustaka, berbagai penelitian terdahulu di Indonesia telah mengkaji pengaruh faktor sosial-ekonomi seperti tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan terhadap indikator pembangunan seperti kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Namun, sebagian besar studi tersebut memiliki keterbatasan, seperti fokus parsial pada hubungan antar variabel tanpa mengintegrasikan dampaknya terhadap dinamika demografis seperti penurunan angka pernikahan. Namun, Penelitian (Agustin & Sumarsono, 2022) menunjukkan bahwa pengangguran dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 38 kabupaten atau kota Jawa Timur tetapi tidak membahas keterkaitannya dengan perilaku pernikahan. Studi (Ardina, 2024) menemukan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, sementara tingkat pengangguran terbuka tidak signifikan, dengan R-squared menjelaskan variasi moderat. Sementara itu, penelitian mengenai fertilitas di negara berkembang (Zimmer, 2026) Temuan ini menegaskan bahwa stabilitas pasar kerja memiliki peran lebih menentukan dalam keputusan fertilitas dibandingkan faktor kemiskinan semata,

serta menunjukkan pentingnya menguji variabel ekonomi secara simultan dalam analisis perilaku demografis, sementara variabel IPM tidak diuji secara simultan.

Penelitian lain seperti Telaga & Langkat, (2023), menyoroti faktor ekonomi memicu pernikahan dini di Jawa Timur, dengan uji chi-square ($\text{sig. } 0,020 < 0,05$) menunjukkan hubungan signifikan, namun tidak menganalisis penurunan angka pernikahan secara keseluruhan. Data BPS Jawa Timur (2024) mencatat penurunan angka pernikahan dari 305.458 pada 2022 menjadi 271.406 pada 2024, berpotensi terkait faktor ekonomi, tetapi studi empiris kuantitatif yang menguji pengangguran, IPM, dan kemiskinan secara simultan masih terbatas.

Kesenjangan utama dalam penelitian-penelitian terdahulu terletak pada masih ditemukannya ketidak serasian hasil mengenai pengaruh tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan terhadap indikator demografis. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan metodologis, antara lain penggunaan model regresi linier berganda dengan periode observasi yang relatif pendek serta belum dimasukkannya variabel kontrol yang merepresentasikan guncangan eksternal, seperti pandemi COVID-19, maupun faktor struktural berupa norma sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara simultan pengaruh tingkat pengangguran, IPM, dan tingkat kemiskinan terhadap penurunan angka pernikahan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2024, menggunakan pendekatan regresi linier berganda berbasis data runtut waktu (time series) dengan penambahan variabel kontrol pandemi COVID-19, sehingga diharapkan mampu menghasilkan temuan empiris yang lebih komprehensif, konsisten, dan memiliki validitas yang lebih kuat dalam menjelaskan dinamika perilaku pernikahan.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor sosial ekonomi seperti pengangguran, IPM, dan kemiskinan, namun kajian yang secara simultan menghubungkan ketiga variabel tersebut terhadap penurunan angka pernikahan di tingkat regional, khususnya di Provinsi Jawa Timur, masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris yang mampu menjelaskan hubungan tersebut secara komprehensif. Dengan menganalisis ketiga variabel tersebut secara simultan dalam kurun waktu 2009-2024, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dinamika sosial ekonomi yang memengaruhi perilaku pernikahan masyarakat secara empiris dan sistematis.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor social ekonomi utama, yaitu tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan, terhadap penurunan angka pernikahan di Provinsi Jawa Timur, dengan judul **“PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran (X1) terhadap penurunan angka pernikahan (Y) di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X2) terhadap penurunan angka pernikahan (Y) di Provinsi Jawa Timur?

3. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan (X3) terhadap penurunan angka pernikahan (Y) di Provinsi Jawa Timur?
4. Variabel manakah di antara tingkat pengangguran (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), dan tingkat kemiskinan (X3) yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap penurunan angka pernikahan (Y) di Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penurunan angka pernikahan di Provinsi Jawa Timur diduga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat kemiskinan. penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap perubahan angka pernikahan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran (X1) terhadap penurunan angka pernikahan (Y) di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X2) terhadap penurunan angka pernikahan (Y) di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan (X3) terhadap penurunan angka pernikahan (Y) di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menganalisis variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap penurunan angka pernikahan (Y) di Provinsi Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan temuan yang memberikan kontribusi ilmiah serta manfaat praktis, baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat luas dan para pemangku kepentingan yang terkait

dengan permasalahan yang dikaji. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang ekonomi pembangunan dan demografi, khususnya terkait hubungan antara kondisi social ekonomi yang meliputi tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat kemiskinan dengan dinamika perilaku pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi empiris dalam pengembangan teori yang menjelaskan pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap keputusan pernikahan di tingkat regional, khususnya di Provinsi Jawa Timur.

2) Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, Mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan pola pemikiran yang sistematis dan dinamis, yang selanjutnya dituangkan secara terstruktur dalam bentuk karya ilmiah. kemudian hasil penelitian dapat dijadikan acuan dan masukan maupun dalam mempertimbangkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- b) Bagi pembaca, untuk mengetahui informasi terkait penurunan angka pernikahan yang ada di Jawa Timur, Sehingga pembaca diharapkan memiliki pertimbangan yang lebih cermat dan berbasis analisis dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi dinamika sosial ekonomi yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan perubahan perilaku pernikahan.
- c) Bagi pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang bersifat empiris dalam proses

pengambilan keputusan, sehingga pemerintah dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat dan terarah dalam merespons dinamika kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi perubahan perilaku pernikahan.

1.5. Batasan penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Lokasi penelitian ini berfokus pada provinsi Jawa Timur.
- 2) Variabel yang digunakan yaitu Angka Pernikahan (variabel dependen), dan Tingkat pengangguran (X_1), Indeks Pembangunan Manusia (X_2), dan Tingkat Kemiskinan (X_3) sebagai variabel independent.
- 3) Data penelitian di peroleh dari Badan Pusat Statistik dengan pengamatan tahun 2009-2024.